

PERAN SANUR BERSATU TRANSPORT TERHADAP MUNCULNYA PARAREM TRANSPORTASI ONLINE DI WILAYAH SANUR

Ni Nyoman Kharismadiani¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ninyoman.kharismadiani@gmail.com¹, ketut.erawan@ipd.or.id², mahaswari@unud.ac.id³

ABSTRACT

This study seeks to find out how the role of Sanur Bersatu Transport in the emergence of online transportation pararem in Sanur area. This study uses Castells' theory of identity politics and Caporaso's political economy theory with qualitative research. The results of this study are in interviews with resource persons, authors find namely the role of Sanur Bersatu Transport in the emergence of pararem. The existence of online transportation in the community makes conventional transportation less attractive and feels excluded. Departing from this, Sanur Bersatu Transport also bring up a policy in their environment that is intended for online transportation. The pararem is intended for the benefit of the Sanur community, especially for Sanur residents who work as conventional transportation drivers and are members of the Sanur Bersatu Transport. The existence of pararem regarding online transportation in the Sanur area is an application of Identity Politics and Political Economy.

Keywords: transportation, identity politics, political economy and pararem

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu transportasi di Indonesia mulai berkembang. Hal ini merupakan pengaruh dari keberadaan globalisasi dan modernisasi yang masuk ke seluruh aspek di masyarakat. Salah satu bentuk dari pengaruh globalisasi dan modernisasi adalah berkembangnya sistem komunikasi di Indonesia. Saat ini masyarakat modern sudah mengenal alat komunikasi yang canggih seperti smartphone atau gawai yang pada saat ini keberadaannya sangat mendukung segala aspek kehidupan. Maraknya penggunaan *smartphone* di Indonesia mempengaruhi perkembangan transportasi umum, salah satunya yaitu munculnya transportasi berbasis *online* di Indonesia.

Bali yang dimana merupakan salah satu destinasi pariwisata favorit para wisatawan baik lokal maupun mancanegara cukup bergantung pada transportasi berbasis *online* ini. Keberadaan transportasi *online* di kalangan masyarakat cukup populer dikarenakan transportasi yang berbasis *online* ini memiliki armadayang lebih banyak dan karena tersebar luas, maka jangkauannya pun lebih mudah. Kemunculan transportasi berbasis *online* di Bali pada tahun 2016 semakin meluas dan bertambah seiring berjalannya waktu. Hal ini terjadi dikarenakan semakin bertambahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi berbasis *online*.

Peningkatan penggunaan transportasi *online* sempat memicu timbulnya konflik diantara transportasi *online* dengan transportasi konvensional. Pengguna

transportasi konvensional kebanyakan sudah beralih menggunakan transportasi *online* yang dimana hal tersebut membuat para supir transportasi konvensional dan para supir transportasi *online* saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan yang sama. Adanya persaingan dan juga kecemburuan sosial antara para pelaku usaha transportasi konvensional dan transportasi *online* menyebabkan timbulnya konflik diantara mereka.

Berdasarkan berita yang dibuat oleh BaliPost.com, sekitar 500 sopir angkutan transportasi konvensional mengadu ke Calon Gubernur Bali pada waktu itu, yakni Bapak Wayan Koster. Mereka yang tergabung dalam Bali Transport Bersatu (BTB) Bali, diterima oleh Calon Wakil Gubernur Bali kala itu, yakni Bapak Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Renon pada hari Senin, 21 Mei 2018.

Para sopir angkutan transportasi konvensional ini memprotes keberadaan transport *online* yang dituding tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108. Permenhub No. 108 mengatur tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yakni angkutan dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu, atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.

Bali Transport Bersatu yang memprakarsai pengaduan kepada Gubernur Bali diikuti juga oleh Sanur Bersatu Transport atau SB Trans. Hal

tersebut disampaikan oleh Bapak Kadek Winata Yasa selaku Ketua Unit SB Trans melalui wawancara secara langsung. SB-Trans itu sendiri merupakan perkumpulan para pelaku transportasi konvensional yang berada di wilayah Sanur sejak tahun 2010 hingga sekarang. SB Trans masuk kedalam Sekaa Teruna Teruni (STT) Sanur Bersatu, yaitu organisasi kepemudaan yang berada di Wilayah Sanur.

Sebelum pengaduan terkait keberadaan transportasi *online* itu terjadi, beberapa wilayah di Bali sudah menetapkan hukum adat atau pararem yang mengatur tentang keberadaan transportasi online di wilayah mereka. Beberapa wilayah yang memiliki pararem mengenai transportasi *online* ini antara lain Kuta, Ubud, dan juga Sanur. Keberadaan dari pararem mengenai transportasi *online* ini disepakati oleh seluruh elemen masyarakat yang berada dan tinggal dilingkungan dimana pararem tersebut berada.

Munculnya pararem transportasi *online* di wilayah Sanur ini merupakan suatu bentuk penolakan terhadap kehadiran transportasi *online* di wilayah Sanur. Kehadiran transportasi *online* itu sendiri dirasa mengancam keberadaan serta pendapatan para supir transportasi konvensional dikarenakan transportasi *online* menawarkan harga dan juga fasilitas yang jauh lebih baik dibanding dengan transportasi konvensional.

Selain itu, transportasi *online* tidak memberikan kontribusi terhadap wilayah Sanur karena pendapatan yang didapat oleh supir transportasi *online* setiap melakukan transaksi menggunakan

aplikasi, pendapatan tersebut akan otomatis masuk kedalam perusahaan start up dimana transportasi *online* itu berasal dan berkembang.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Politik Identitas

Politik identitas merupakan keterlibatan masing-masing individu pada kehidupan sosial yang ditentukan oleh psikologis dan juga budaya seseorang. Berdasarkan pada kondisi akhirnya Castells (dalam Wirawan dan Dewi, 2018) membagi pembangunan identitas politik ke dalam tiga bentuk yakni legitimizing identity, resistance identity dan project identity.

a. Legitimizing Identity

Legitimizing identity merupakan pengertian mengenai identitas yang dimana diperkenalkan oleh institusi masyarakat yang memiliki pengaruh kuat untuk memperpanjang dan mewajarkan dominasi mereka dengan aktor-aktor sosial. Castells membuktikan bahwa konstruktor identitas dan alasan konstruksi memiliki kemampuan untuk menetapkan makna budaya dan isi simbolis dari identitas bagi mereka dalam mengidentifikasi hal itu.

b. Resistance Identity

Resistance identity atau identitas resistensi kebanyakan ditampilkan oleh aktor sebagai wujud resistensi terhadap stigmatisasi yang dialami maupun dominasi yang dihadapi, sehingga identitas yang ditampilkan seringkali selalu berlawanan dengan wujud yang dominan. Identitas resistensi didasari aktor yang terkena pengesklusian bias yang mengembangkan resistensi berdasarkan

kelangsungan hidup terhadap bandingan yang kuat terhadap kekuatan masyarakat dominan.

c. Project Identity

Dalam *project identity*, identitas yang dibangun ketika aktor-aktor sosial di mana basis material memungkinkan untuk mereka membangun identitas baru, yang mendefinisikan kedudukan mereka dalam masyarakat dan dalam prosesnya terus melakukan transformasi pada keseluruhan struktur sosial yang ada di dalamnya.

Ekonomi Politik

Menurut Caporaso dan Levine (dalam Bahri dan Masriadi, 2018), pendekatan ekonomi politik sendiri secara eksplisit dimaknai sebagai suatu pertalian di antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi, yang meliputi aktivitas produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain sebagainya.

Pendekatan ini memandang ekonomi sebagai cara melakukan tindakan (*a way of acting*), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (*a place to act*). Dengan pengertian ini, pandangan keliru yang selama ini diyakini banyak orang telah dibenarkan, yakni pendekatan ekonomi politik berupaya untuk mencampur antara analisis ekonomi dan politik dalam analisis suatu persoalan.

Organisasi SB Trans

Organisasi SB Trans itu sendiri merupakan organisasi non-pemerintah yang di dalamnya berisikan orang-orang yang bergerak atau bekerja dibidang transportasi konvensional di wilayah Sanur. Organisasi ini

telah berdiri sejak tahun 2014 hingga sekarang. Keberadaan SB Trans ini mengatur anggota-anggota mereka yang kebanyakan merupakan warga wilayah Sanur yang mencari penghasilan melalui jasa transportasi konvensional dengan menjadi sopir-sopir tour guide.

Organisasi SB Trans masuk kedalam lingkup Organisasi Kepemudaan Sanur Bersatu yang berada di wilayah Sanur. Organisasi Sanur Bersatu itu sendiri berevolusi dari organisasi kepemudaan yang awalnya berperan untuk menjaga keamanan di Desa Sanur menjadi organisasi yang juga turut mengatur perekonomian Desa Sanur yang dimana bergerak di sektor pariwisata.

Teritorial atau Kewilayahan Sanur

Sanur memiliki berbagai karakteristik, kelembagaan, serta pesona yang dimana merupakan salah satu kekayaan pulau dewata yang dikagumi baik itu oleh warga lokal maupun wisatawan mancanegara. Akibatnya Sanur mengalami kemajuan dari berbagai sektor yang sangat cepat. Wilayah Sanur merupakan wilayah yang sangat berpotensi dalam pengembangan pariwisata, karena Sanur menawarkan berbagai macam atraksi wisata dan juga memiliki fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata.

Sanur berpotensi untuk memajukan kehidupan masyarakat yang berada disepertan wilayah Sanur dan turut menyokong Bali. Sebagai sektor pariwisata, tentunya keberadaan transportasi sangat diperlukan bagi Sanur sebagai fasilitas untuk para wisatawan

yang datang dan melancong di kawasan Sanur.

Sistem Hukum Adat (Pararem) Terhadap Transportasi Online di Sanur

Dalam Hukum Adat Bali dikenal dengan dua istilah awig-awig dan pararem. Awig-awig merupakan suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat.

Sedangkan pararem merupakan suatu ketentuan bersama dalam sebuah paruman atau rapat adat Masyarakat Bali, yang kemudian disepakati dan dilaksanakan. Pada umumnya pararem berisi ketentuan-ketentuan serta hukuman lanjutan dari awig-awig yang dirasa belum paten, namun tidak menutup kemungkinan pararem juga bisa dibuat untuk hal-hal spesifik yang belum dimuat dalam awig-awig.

3. METODELOGI PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul "Peran Sanur Bersatu Transport Terhadap Munculnya Pararem Transportasi Online Di Wilayah Sanur" menggunakan jenis penulisan kualitatif deskriptif.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dilapangan dan juga melalui artikel berita. Unit analisis dalam penelitian ini adalah SB Trans yang merupakan perkumpulan transportasi konvensional di wilayah Sanur. Data yang diperoleh menggunakan teknik observasi serta wawancara. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan memetakan objek penelitian menjadi

tiga hal yaitu SB Trans sebagai organisasi transportasi konvensional, teritorial wilayah Sanur, serta *pararem* transportasi *online* di wilayah Sanur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Sanur

Wilayah Sanur yang dijadikan sebagai lokasi penelitian terdiri dari Desa Adat Intaran dan Desa Adat Sanur. Desa Adat Intaran Sanur adalah Desa adat yang terdiri dari Desa Dinas Sanur Kauh dan Kelurahan Sanur dengan luas wilayah sebesar 788,0 Ha. Desa Adat Intaran dibagi menjadi 19 banjar, yakni 9 banjar dari Desa Sanur Kauh dan 10 banjar dari Kelurahan Sanur. Desa Sanur Kauh terdiri dari 9 banjar, yaitu: Banjar Adat Belanjong, Medura, Dangin Peken, Tewel Sari, Abian Timbul, Penopengan, Pekandelan, Puseh Kauh dan Puseh Kangin. Sedangkan untuk Kelurahan Sanur sendiri terdiri dari 10 banjar, yaitu: Banjar Adat Langon, Singgi, Panti, Gulingan, Taman Sari, Sindu Kaja, Sindu Kelod, Batujimbar, Semawang, dan Betngandang. Luas Wilayah Desa Sanur Kauh secara keseluruhan adalah seluas 386,0 Ha, dan wilayah Kelurahan Sanur secara keseluruhan adalah seluas 402,0 Ha. Jadi, total luas Desa Adat Intaran Sanur yang terdiri dari 2 (dua) Desa Dinas, yakni Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kauh adalah 788,0 Ha.

Untuk Desa Adat Sanur itu sendiri adalah Desa adat yang terdiri dari Desa Dinas Sanur Kaja dengan luas wilayah sebesar 269,0 Ha. Desa Adat Sanur terdiri dari 10 banjar, yaitu: Banjar Adat Belong, Batanpoh, Pekandelan, Buruwan, Tegal

Asah, Langon, Wirasana Anggarkasih, Tangtu, dan Tegeh Selang. Luas Wilayah Desa Sanur Kaja secara keseluruhan adalah seluas 269,0 Ha.

Solidaritas Pemuda Sanur

Kehadiran organisasi pemuda yang cukup besar di Bali ini membuat masyarakat Bali, terutama warga Sanur khawatir apabila anak-anak mereka terlibat dengan organisasi tersebut. Masyarakat merasa apabila keikutsertaan anak-anak mereka pada salah satu organisasi tersebut akan memecah belah wilayah Sanur. Karena adanya rasa khawatir akan hal tersebut, maka Himpunan Pemuda Sanur Bersatu hadir atas usulan dan juga inisiatif dari para pemuda di Sanur untuk meminimalisir masuknya organisasi luar ke Sanur. Keberadaan Himpunan Pemuda Sanur Bersatu difungsikan sebagai organisasi yang melindungi segala aktivitas yang terjadi di dalam wilayah Sanur. Keberadaan Himpunan Pemuda Sanur Bersatu turut memunculkan pula Sanur Bersatu Transport atau yang lebih dikenal sebagai SB Trans yang dimana SB Trans merupakan organisasi penghimpun transportasi konvensional di wilayah Sanur yang metode operasinya terbagi kedalam 2 unit, diantaranya unit hotel dan unit freelance atau unit yang berada disepertaran jalan Sanur.

Selain itu penulis juga mendapatkan informasi bahwa keberadaan SB Trans di Sanur ini juga didedikasikan khusus untuk warga Sanur, terutama para pemuda-pemudi usia bekerja di Sanur yang menginginkan pekerjaan. Keanggotaan dari SB Trans hanya boleh diisi oleh warga Sanur saja. Orang yang berasal dari luar

wilayah Sanur tidak diperbolehkan mendaftar menjadi anggota SB Trans. Tetapi, orang-orang di luar wilayah Sanur yang terlebih dahulu sudah menjadi sopir transportasi konvensional di wilayah Sanur sebelum FORTINS beralih menjadi SB-Trans tetap didata sebagai anggota SB-Trans. Hal ini tertuang dalam AD/ART SB-Trans, tetapi AD/ART tersebut tidak dapat dipublikasikan karena informasi tersebut bersifat rahasia bagi internal organisasi SB-Trans.

Orang yang tergabung menjadi anggota SB Trans secara tidak langsung memiliki privilege atau keuntungan karena mereka merupakan anak organisasi dari Himpunan Kepemudaan Sanur Bersatu. Apabila ada terkendala di jalanan atau kedatangan cekcok dengan transportasi diluar SB Trans sebagai contoh transportasi *online*, anggota SB Trans bisa meminta bantuan untuk meluruskan permasalahan tersebut dari Ketua Unit SB Trans yang dimana Ketua Unit SB Trans merupakan anggota dari Himpunan Kepemudaan Sanur Bersatu.

Konflik Antar Pelaku Transportasi Angkutan Penumpang

Banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali membuat Bali dalam hal pariwisatanya menawarkan berbagai macam fasilitas penunjang bagi para wisatawan untuk menikmati liburan mereka. Mulai dari fasilitas penginapan, tempat makan atau restoran, dan juga transportasi. Kebanyakan masyarakat di Bali memilih untuk bekerja di bidang pariwisata terutama menjadi seorang Tour Guide atau sopir transportasi konvensional.

Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah masyarakat, keberadaan transportasi konvensional ini semakin tergeser oleh keberadaan transportasi *online* yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dengan munculnya transportasi *online* ini ditengah-tengah masyarakat, semakin lama transportasi konvensionalpun semakin berkurang peminatnya.

Masuknya transportasi *online* kewilayah yang menjadi tempat beroperasinya transportasi konvensional menimbulkan konflik diantara keduanya, terutama di wilayah Sanur.

Wilayah Sanur menjadi salah satu lokasi padat wisatawan yang sangat berpotensi bagi para pelaku transportasi angkutan penumpang. Kemunculan transportasi *online* di wilayah Sanur menimbulkan rasa ketidaksukaan bagi transportasi konvensional yang sudah bertahun-tahun beroperasi dan mencari nafkah di wilayah Sanur. Konflik yang terjadi antara SB Trans dan transportasi *online* menimbulkan adanya gap antara kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang dibuat oleh SB Trans berupa pembagian giliran dalam beroperasi pada tiap-tiap anggota sedangkan transportasi *online* tidak memiliki aturan seperti yang dijalankan oleh SB Trans.

Namun disatu sisi, 2 Desa Adat di wilayah Sanur yakni Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran justru mendukung adanya transportasi *online*. Desa Adat Sanur sendiri yang sudah menandatangani MOU (Memorandum of Understanding) dengan pihak GRAB selaku pihak

transportasi *online* di tahun 2020 dan pihak desa adat Intaran belum ada hubungan kerjasama dengan GRAB. Hal ini dilakukan oleh Desa Adat Sanur dikarenakan adanya COVID-19 yang mengganggu perekonomian seluruh Indonesia terutama wilayah Bali termasuk wilayah Sanur didalamnya.

Penandatanganan MoU yang dilakukan oleh pihak Desa Adat Sanur dengan Grab berpotensi menimbulkan konflik antara transportasi konvensional yang dinaungi oleh SB Trans dengan transportasi *online* yakni GRAB. Konflik ini dapat ditimbulkan karena adanya rasa kecemburuan dari pihak transportasi konvensional kepadatransportasi *online*.

Pararem Transportasi Online Wilayah Sanur

Pararem merupakan suatu peraturan tidak tertulis yang ditujukan *in general* untuk orang dalam ataupun orang luar banjar atau lingkungan dimana pararem ditetapkan. Peraturan yang ditetapkan biasanya berkaitan dengankegiatan sehari-hari yang di oleh orang-orang di banjar tersebut.

Konflik yang terjadi di antara para pelaku transportasi konvensional dan transportasi *online* di wilayah Sanur memunculkan adanya banner berisikan larangan untuk masuk dan beroperasinya transportasi *online*. Hal ini merupakan salahsatu bentuk pararem yang dikeluarkan oleh SB Trans dan diketahui oleh Bendesa DesaAdat di Kelurahan Sanur, Sanur Kaja, dan Sanur Kauh. Selain itu pada rapat mengenai pararem ini turut menghadirkan Ketua SB Trans Divisi Hotel dan Freelance dan juga para sopir transportasi *online*

sebagai perwakilan dari transportasi *online* yang beroperasi di wilayah Sanur.

Pararem mengenai transportasi *online* yang ditujukan kepada para pelaku transportasi *online* ini di tegaskan oleh SB-Trans kepada para sopir transportasi *online* yang lalu lalang mengantar jemput wisatawan yang menginap atau sekadar mengunjungi tempat pariwisata di wilayah Sanur. Keberadaan transportasi *online* yang meresahkan para pelaku transportasi konvensional membuat SB Trans mengeluarkan pararem mengenai pelarangan beroperasinya transportasi *online* di wilayah Sanur.

Politik Identitas Yang Terbentuk Di Tengah Masyarakat Sanur

Dalam penelitian ini, penulis melandaskan politik identitas sebagai teori dalam melakukan penelitian. Penulis melihat bahwa penemuan yang ditemukan oleh peniliti ketika melakukan penelitian bisa dianalisis menggunakan teori politik identitas milik Castells. Berdasarkan pada hasil temuan yang ditemukan oleh penulis, menurut penulis hasil temuan bisa dianalisis menggunakan teori *legitimizing identity*, dan *resistance identity*.

Legitimizing identity merupakan suatu pengertian mengenai identitas yang diperkenalkan oleh institusi masyarakat dimana institusi tersebut memiliki pengaruh kuat untuk memperpanjang dan merasionalisasi dominasi mereka dengan aktor-aktor sosial. Hal ini bisa dilihat dari hadirnya SB Trans sebagai organisasi transportasi konvensional yang berada dibawah naungan Organisasi Sanur Bersatu.

Keberadaan organisasi transportasi konvensional di wilayah Sanur mendominasi transportasi di wilayah tersebut dengan menerapkan sistem perkerutran yang dimana hanya warga yang berasal dari Sanur, menetap di Sanur dan ikut berkontribusi di banjar lah yang bisa mencari nafkah sebagai sopir transportasi konvensional. Menjadi sopir transportasi konvensional merupakan pekerjaan yang cukup menjanjikan mengingat Sanur merupakan wilayah padat pariwisata.

Berdasarkan hasil temuan, dengan adanya SB Trans yang menaungi bagian transportasi konvensional di Sanur, maka diharapkan bahwa wilayah Sanur bisa mengelola pariwisatanya sendiri dengan mengutamakan masyarakatnya untuk bekerja di wilayah mereka sendiri dan meminimalisir masuknya orang di luar wilayah Sanur untuk bekerja disana terutama di bidang transportasi.

Selanjutnya ialah *resistance identity*. *Resistance identity* atau identitas resistensi merupakan suatu bentuk resistensi terhadap stigmatisasi yang dialami maupun dipengaruhi oleh kekuasaan kuat yang dihadapi, sehingga identitas yang ditampilkan seringkali bertentangan dengan bentuk yang dominan.

Dalam hal ini, SB- Trans yang merupakan kelompok dominan di bidang transportasi konvensional di wilayah Sanur merasakan adanya intervensi dan juga dominasi yang dilakukan oleh transportasi *online* di wilayah Sanur. Keberadaan dari transportasi *online* yang mulai menjamur dari tahun ke tahun sejak awal

kemunculannya meresahkan para pelaku transportasi konvensional yang sudah lama beroperasi terutama di wilayah Sanur.

Hal tersebut yang membuat SB Trans mengeluarkan pararem yang melarang beroperasinya transportasi *online* di wilayah mereka supaya transportasi konvensional bisa tetap berjalan dan masyarakat yang menggantungkan hidup dengan bekerja sebagai sopir transportasi konvensional dibawah naungan SB Trans bisa tetap mendapatkan penghasilan.

Ekonomi Politik Melalui Pararem Transportasi Online

Berdasarkan pada teori yang digunakan sebagai landasan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis setelah menggunakan teori politik identitas, penulis akan menganalisis hasil temuan menggunakan teori selanjutnya yakni teori ekonomi politik.

Ekonomi dan politik merupakan dua hal yang dimana keberadaannya selalu berdampingan. Hal tersebut bisa dikaji dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif ekonomi dan juga dari perspektif politik. Berbagai kebijakan ekonomi menjadi tidak memiliki "power" atau kekuatan untuk dilangsungkan tanpa ada dukungan politik didalamnya, dengan kata lain politik memiliki peran untuk menempatkan dan mendorong kebijakan ekonomi sebagai kebijakan yang harus dilangsungkan.

Caporaso dan Levine (dalam Mufti, 2018) mengembangkan penerapan pendekatan ekonomi terhadap politik menjadi tiga, yaitu teori pilihan publik, analisis ekonomi terhadap kebijakan dan

analisis ekonomi terhadap institusi. Sedangkan pendekatan politik terhadap ekonomi menekankan pada prinsip bahwa politik memiliki peran penting pada proses pembuatan keputusan atau kebijakan (*decision maker*).

Kemunculan pararem mengenai penolakan beroperasinya transportasi *online* di wilayah Sanur merupakan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh SB Trans sebagai organisasi yang mengelola keberadaan transportasi konvensional di wilayah Sanur. Kebijakan yang dikeluarkan oleh SB Trans merupakan salah satu bentuk adanya penerapan teori ekonomi politik di wilayah Sanur.

Kebanyakan pekerjaan terutama di bidang pariwisata yang ada di wilayah Sanur diisi oleh Warga Sanur. Bahkan organisasi SB Trans yang mewadahi transportasi konvensional yang beroperasi di sana menetapkan aturan bahwa hanya warga Sanur terutama yang ikut mebanjar adalah yang boleh mengisi pekerjaan sebagai seorang driver pariwisata disana.

Selain itu, adanya kebijakan yang menolak beroperasinya transportasi *online* di wilayah Sanur yang dibuat oleh SB Trans bukan tanpa alasan. Beroperasinya transportasi *online* terutama di wilayah Sanur tentu akan mengurangi pendapatan para pelaku transportasi konvensional disana. Hal ini tak hanya berpengaruh bagi anggota SB Trans, namun hal ini berpengaruh juga terhadap Sanur Bersatu yang merupakan organisasi kepemudaan yang mewadahi SB Trans.

Saat SB Trans beroperasi, anggota yang turun untuk beroperasi akan

mendapatkan pemotongan pendapatan sebanyak 20%. Hal ini hanya berlaku bagi anggota yang bekerja untuk unit hotel. Pembagian dari 20% pemotongan pendapatan tersebut adalah, 10% untuk diberikan ke hotel, 5% untuk gaji karyawan yang bekerja sebagai admin, dan 5% untuk Sanur Bersatu. Apabila pendapatan yang masuk berkurang, otomatis pemasukan untuk Sanur Bersatu juga berkurang. Selain itu anggota SB Trans tentunya juga akan berdampak pendapatannya.

Berdasarkan hasil temuan penulis, apabila dikaitkan dengan teori ekonomi politik, maka keberadaan transportasi *online* yang beroperasi berbarengan dengan transportasi konvensional milik SB-Trans tentunya akan menghambat keberlangsungan SB Trans sekaligus Sanur Bersatu yang merupakan organisasi yang mewadahi SB Trans.

Munculnya pararem transportasi *online* di wilayah Sanur yang menolak beroperasinya transportasi *online* merupakan implementasi dari kebijakan ekonomi politik yang ada di wilayah Sanur, dimana selalu meninjau struktur kekuasaan dan sosial yang hidup di masyarakat, khususnya masyarakat yang ditargetkan menjadi sasaran kebijakan.

Pararem ini tentunya akan melindungi kepentingan-kepentingan yang ada terutama kepentingan antara Sanur Bersatu melalui SB Trans yang menjalin kongsi dengan beberapa hotel di wilayah Sanur. Karena apabila kepentingan dari penguasa itu tidak ada, maka kebijakan mengenai pelarangan beroperasinya transportasi *online* di wilayah Sanur tentu tidak akan ada.

5. SIMPULAN

Kesimpulan ini memiliki tujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis dalam pendahuluan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dianalisis menggunakan teori Politik Identitas milik Castells dan Ekonomi Politik milik Caporasi dan Levine, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Konflik yang melibatkan transportasi konvensional dan transportasi *online* merupakan konflik yang terjadi akibat ketidakpuasan transportasi konvensional terhadap kehadiran transportasi *online*. Selain itu, transportasi konvensional juga merasa bahwa harga yang ditawarkan oleh transportasi *online* sangat tidak bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh transportasi konvensional sehingga terjadi gap diantara kedua moda transportasi tersebut.
- 2) Transportasi konvensional menuntut adanya ketegasan peraturan terhadap keberadaan transportasi *online*. Peraturan tersebut meliputi harga dan juga lokasi tempat transportasi *online* berdiam. Hal ini untuk menegaskan kejelasan transportasi *online* di masyarakat, sama seperti transportasi konvensional. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengatur transportasi *online* dalam beroperasi.
- 3) Dengan munculnya transportasi *online* yang dimana keberadaannya menyaingi transportasi konvensional, secara langsung hal tersebut berdampak pula pada pendapatan yang di dapat oleh para sopir

transportasi konvensional. Karena pendapatan berkurang, otomatis uang pemasukan ke Himpunan Pemuda Sanur Bersatu juga berkurang. Hal ini dikarenakan masing-masing sopir transportasi konvensional SB Trans unit hotel dan unit *freelance* memberikan pendapatannya untuk uang kas dan khusus unit hotel, pendapatan harian mereka dikurangi sebesar 20% untuk dibagikan ke hotel dan juga untuk Himpunan Pemuda Sanur Bersatu.

- 4) Dibentuknya pararem mengenai transportasi *online* merupakan bentuk pertahanan dari keberadaan transportasi *online* yang semakin menjamur sejak awal kemunculan mereka hingga sekarang. Pararem yang dikeluarkan oleh SB Trans merupakan kewenangan yang dikeluarkan langsung oleh SB Trans karena segala macam hal mengenai transportasi sudah dilimpahkan kepada SB Trans dan tidak ada campur tangan dari pihak desa.

6. SARAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Peran Sanur Bersatu Transport Terhadap Munculnya Pararem Transportasi Online Di Wilayah Sanur” yang dianalisis dengan teori Politik Identitas milik Castells dan Ekonomi Politik milik Caporasi dan Levine, maka saran yang penulis ajukan yaitu sebagai berikut :

- 1) Diharapkan adanya peraturan lebih lanjut mengenai penetapan harga diantara transportasi konvensional dan transportasi *online*. Hal tersebut

dilakukan untuk menghindari gap yang terjadi pada kedua belah pihak. Adanya peraturan tersebut diharapkan supaya kedua belah pihak bisa sama-sama berjalan beriringan tanpa ada yang merasa dirugikan secara materiil dan imateriil. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah konflik terjadi kembali diantara pelaku transportasi konvensional dan juga pelaku transportasi *online*.

- 2) Diperlukan adanya negosiasi yang baik antara kedua belah pihak terkait dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak SB Trans. Peraturan tersebut meliputi pelarangan adanya sopir yang berasal dari luar wilayah Sanur dan juga peraturan mengenai pengambilan penumpang yang dimana SB Trans itu sendiri memberikan syarat pengambilan penumpang bagi anggotanya dengan menggunakan sistem penomoran. Negosiasi tersebut perlu dilakukan antara kedua belah pihak supaya bisa mendapatkan solusi lain dari adanya peraturan tersebut.
- 3) Sehubungan dengan pendapatan dari pihak SB Trans yang berkurang karena hadirnya transportasi *online* ditengah masyarakat, sebaiknya dihadirkan opsi lain dari pihak SB-Trans dalam mencari pemasukan tambahan atau lainnya untuk mengatasi masalah tersebut. Dan diharapkan juga adanya bantuan dari pemerintah untuk mempromosikan

transportasi konvensional kepada masyarakat supaya perekonomian masyarakat di desa tersebut tetap berjalan.

7. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Erani, Ahmad Yustika. 2009. Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Mufti, Muslim. (2018). Ekonomi Politik. Bandung: CV Pustaka Setia.

Suyanto, B., & Sutinah. (2005). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Prenamedia Group.

Referensi dari internet:

Heryana, Ade. (2018). "Organisasi dan Teori Organisasi". https://www.academia.edu/38353586/Pengertian_Organisasi_dan_Teori_Organisasi diakses pada 14 Maret 2020.

Wirawan, IGM. Arya Suta dan Dewi, Kadek Sintya. (2018). "Identitas Politik dan Politik Identitas Masyarakat Muslim di Bali". <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index> diakses pada 7 Agustus 2020.

Jurnal (Online) :

Bahri, H., & Masriadi, M. (2018). Ekonomi Politik Media di Indonesia. AT-TANZIR: JURNAL ILMIAH PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM, , 25 - 38. Di unduh pada 13 Juni 2021 dari <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tanzir/article/view/156>

Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. Journal of Politics and Policy, 1(1), 19-30. Di unduh pada 29 Juli 2020 dari <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/viewFile/4/8>

Mardika, Made. (2013). Eksistensi Hukum Adat Dalam Menjaga Keharmonisan Masyarakat Bali. Universitas Pendidikan Ganesha. Di unduh pada

10 Juni 2021 dari
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/406>

Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali. *Widya Accarya*, 7(1). Di unduh pada 10 Mei 2021 dari <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/433>